



Minyak Sawit dan Arah Baru Diplomasi Tarif AS di Era Kesehatan Global

Selama dua dekade terakhir, impor minyak sawit oleh Amerika Serikat melonjak tajam, didominasi oleh pasokan dari Indonesia yang mencapai 91 persen. Meski diwarnai isu deforestasi dan kebijakan tarif baru yang akan diberlakukan pada Agustus 2025 (19 persen untuk Indonesia), minyak sawit tetap menjadi pilihan utama industri makanan AS karena bebas *trans fatty acid* (TFA), stabil secara fungsional, dan tersedia dalam volume besar. Keunggulan ini menjadikannya pengganti ideal bagi minyak yang sebelumnya mengandung TFA, yang kini dilarang. Kondisi ini membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya melalui narasi berbasis sains dan praktik produksi berkelanjutan.

**Selengkapnya di halaman 9*



Sebelum Telat, Yuk Dorong Biochar Limbah Sawit

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi biochar, bahan kaya karbon yang dapat meningkatkan kualitas tanah dan menyerap emisi karbon. Setiap tahun, jutaan ton limbah biomassa sawit seperti tandan kosong, cangkang, dan serat mesocarp dihasilkan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Biochar, yang dibuat melalui proses pirolisis pada suhu tinggi, memiliki struktur berpori yang mampu menyerap air dan unsur hara, serta mendukung kesuburan tanah meski bukan pupuk. Teknologi saat ini memungkinkan produksi biochar secara efisien, bahkan berpotensi menyumbang hingga USD 1 miliar ke PDB pada 2030. Jadi, mengapa kita tidak segera mengubah limbah sawit menjadi aset berharga bagi masa depan Indonesia?

**Selengkapnya di halaman 4*

Menyeimbangkan Harga, Menumbuhkan Pasar: Skema Insentif untuk Tata Kelola UCO

Minyak jelantah bukan lagi sekadar limbah, kini tengah menjelma jadi komoditas strategis dalam transisi energi bersih. Di tengah naiknya permintaan global untuk biodiesel dan Sustainable Aviation Fuel (SAF), Indonesia memiliki potensi UCO lebih dari 3 juta kiloliter per tahun, namun baru sebagian kecil yang berhasil dimanfaatkan, dan sebagian besar diekspor. Ketimpangan ini bisa diatasi melalui skema insentif bertahap: mendorong permintaan SAF, memberi insentif fiskal, dan menetapkan harga dasar berbasis nilai lingkungan. Jika dirancang dengan tepat, strategi ini tak hanya membuat harga UCO domestik kompetitif, tapi juga menjadikan UCO sebagai pilar ekonomi sirkular dan masa depan energi berkelanjutan Indonesia.

**Selengkapnya di halaman 7*



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Industri sawit Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks. Di sisi lain, upaya penguatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan skema kemitraan dan transparansi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan produksi dan daya saing. Agar industri sawit dapat terus tumbuh dan beradaptasi dengan kondisi global yang berubah cepat, sinergi kebijakan dan dukungan pelaku usaha menjadi kunci utama. Selamat membaca IPOSS News Edisi Kesebelas!

Akibat Perang Minyak Nabati, Ekspor Sawit Terjun di April

Fluktuasi ekspor CPO memang lumrah terjadi. Fenomena naik dan turun volume ekspor tidak bisa dihindari sebagai efek dari mekanisme pasar global. Adanya faktor *supply* dan *demand* minyak nabati lain, turut mempengaruhi permintaan minyak sawit, yang secara langsung berdampak pada perubahan ekspor minyak sawit.

Walaupun demikian, turunnya ekspor sawit pada bulan April tahun ini bisa dibilang mengagetkan. Dilansir dari siaran pers Gapki (25/6), ekspor pada April 2025 turun luar biasa tajam dibandingkan bulan Maret 2025, jauh melampaui tren bulanan biasa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dilaporkan, ekspor pada bulan dimaksud hanya mencapai 1,78 juta ton, turun hampir 40% dibandingkan Maret yang sebesar 2,87 juta ton.

Menariknya, penurunan volume ekspor ini terjadi justru saat produksi domestik meningkat. Masih dari sumber yang sama, produksi CPO Indonesia pada April mencapai 4,48 juta ton, naik 2% dari Maret. Membuat stok melonjak, dari 2,02 juta ton di awal bulan menjadi 3,05 juta ton di akhir April. Menurut beberapa laporan produksi di tahun 2025 diperkirakan meningkat, termasuk laporan dari *Malaysian Palm Oil Council* (MPOC), yang memperkirakan bulan April ini akan menandai awal kenaikan produksi, sehingga tekanan pasokan berpotensi mendorong harga turun secara musiman (MPOC, 19/6).

Dalam analisis pasar 2025, menyebutkan bahwa April biasanya membawa koreksi harga karena masuknya hasil panen besar-besaran dari kebun di Indonesia dan Malaysia. Harga CPO dapat turun 10–15 % dibanding bulan-bulan sebelumnya karena membanjirnya pasokan (*Grease Connections*, 15/6). Dalam tren historis, April 2024 tercatat turun 0,77 % dari Maret, sementara April 2022 turun 5,3 % dari bulan sebelumnya (IndexMundi, 2024).

Selain faktor musiman, tekanan global dari substitusi minyak nabati lain juga signifikan. Pada April 2025, harga referensi CPO di pasar Rotterdam tercatat sebesar USD 1.553 per ton. Sementara itu, sebagai perbandingan, harga minyak bunga matahari di Rotterdam pada Maret 2025 sekitar USD 1.228 per ton, dan harga minyak rapeseed (canola) di April 2025 mencapai USD 1.229 per ton. Perbedaan harga ini menjadi ujung tombak masalah: ketika harga CPO lebih tinggi, konsumen global mulai mempertimbangkan beralih ke minyak

bunga matahari atau rapeseed yang lebih murah. Menurut Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI, kondisi ini diperparah oleh melonjaknya produksi minyak bunga matahari di Eropa dan Laut Hitam, yang menyebabkan pasokan melimpah. Akibatnya, para pemakai di industri makanan dan kosmetik terdorong untuk mencari alternatif yang lebih ekonomis (Majalah Hortus, 28/2).

Dampaknya cukup jelas. Volume ekspor sawit ke India turun hingga 68%, ke Uni Eropa dan Tiongkok masing-masing 62%, dan Pakistan sekitar 42% (kumparan, 25/6). Ini menunjukkan bahwa harga yang terlalu tinggi justru membuat minyak sawit kehilangan daya saing. Padahal di saat bersamaan, kebutuhan minyak nabati global tetap stabil. Namun, karena harga sawit sempat menyamai atau bahkan melampaui harga minyak bunga matahari, pasar pun bergeser.

Meskipun volume ekspor mengalami penurunan, nilai ekspor Januari–April 2025 justru naik 30% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari USD 8,3 miliar menjadi USD 10,8 miliar. Kenaikan nilai ini lebih banyak dipicu oleh tingginya harga minyak sawit, bukan karena peningkatan permintaan. Kondisi ini memang memberikan keuntungan sementara, tetapi jika volume ekspor terus menurun, keberlanjutan pendapatan ekspor sawit akan terancam dalam jangka panjang.

IPOSS (*Indonesia Palm Oil Strategic Studies*) sejak lama menyoroti potensi bahaya ketergantungan pada ekspor CPO mentah. Dalam berbagai diskusi dan forum kebijakan, IPOSS mendorong percepatan hilirisasi, termasuk pengembangan bioavtur, biodiesel, serta produk oleokimia dan kosmetik. Dengan naiknya stok dan fluktuasi harga, dorongan ke arah diversifikasi industri menjadi semakin mendesak.

Pemerintah dan pelaku industri perlu menyusun strategi harga yang adaptif. Jika harga sawit terlalu tinggi, pasar beralih. Bila terlalu rendah, petani kehilangan insentif. Maka, menjaga keseimbangan menjadi kunci agar industri tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sejarah juga memberi peringatan. Dulu, karet alam sempat dikalahkan oleh karet sintetis karena terlalu mahal dan tidak kompetitif. Jangan sampai industri sawit menghadapi nasib serupa akibat ketidaksiapan menanggapi dinamika substitusi. (JH)

Efek Domino Perang Israel-Iran: Sawit Indonesia Diuntungkan atau Tertekan?



Perang antara Israel dan Iran yang pecah pada pertengahan tahun 2025 menyebabkan gejolak besar di pasar energi global. Ketegangan militer yang meningkat mendorong harga minyak mentah jenis Brent naik hingga 10 persen hanya dalam dua pekan. Kenaikan ini memicu efek domino pada pasar komoditas lainnya, termasuk minyak nabati seperti minyak kelapa sawit (CPO) yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Financial Times dalam laporan bulan Juni 2025 menyebutkan bahwa lonjakan harga minyak mentah telah mendorong lonjakan permintaan global terhadap bahan bakar nabati sebagai alternatif yang lebih stabil secara harga, termasuk biodiesel berbasis CPO.

Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar dunia sangat terdampak oleh kondisi ini. Data dari Reuters menunjukkan bahwa harga CPO Malaysia sempat menembus RM 4.100 per ton, tertinggi dalam lima bulan terakhir. Lonjakan harga ini turut mendorong harga referensi CPO Indonesia, meskipun tetap fluktuatif akibat berbagai faktor lain seperti cuaca dan logistik. Pada Februari 2025, Kementerian Perdagangan Indonesia menetapkan harga referensi CPO sebesar US\$955,44 per ton, namun pada Juni 2025 angka ini turun menjadi US\$856,38 per ton karena meningkatnya pasokan dari Malaysia dan melemahnya permintaan dari negara importir utama seperti India.

Sementara harga mengalami fluktuasi tajam, sisi produksi justru mengalami tekanan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa total produksi CPO Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 52,76 juta ton, turun 3,8 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 54,84 juta ton. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya tanaman sawit tua, keterlambatan program replanting, serta pengaruh cuaca ekstrem El Niño yang menurunkan produktivitas. Kondisi ini berlanjut ke awal tahun 2025, di mana produksi Januari turun sebesar 9,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi konsumsi, permintaan domestik tetap tinggi terutama karena implementasi program biodiesel nasional. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendorong kebijakan B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dalam solar, yang diperkirakan akan menyerap hingga 13,6 juta ton CPO sepanjang tahun 2025. GAPKI dalam rilis resminya pada awal tahun menyebutkan bahwa jika program ini meningkat ke B50, potensi penyerapan CPO dalam negeri dapat mencapai 18 hingga 20 juta ton, yang secara langsung mengurangi volume ekspor.

Penurunan ekspor juga telah tercermin dalam data terbaru. Ekspor CPO Indonesia pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,06 juta ton, turun 21,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, total ekspor mencapai 29,5 juta ton, menurun dari 32,2 juta ton pada 2023. Sebaliknya, konsumsi domestik naik dari 23,2 juta ton menjadi 23,8 juta ton, dengan porsi terbesar disumbang oleh sektor biodiesel yang tumbuh 7,5 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, analisis pasar global yang diwawancarai oleh Reuters menyebutkan bahwa era harga CPO murah sudah berakhir. Salah satu analisis dari India bahkan menyatakan, *"Those days of \$400-per-ton discounts are gone,"* mengacu pada kombinasi kebijakan domestik Indonesia dan stagnasi produksi global yang akan menjaga harga CPO tetap tinggi dalam jangka menengah.

Konflik Israel-Iran sendiri tidak berdampak langsung terhadap produksi kelapa sawit Indonesia, namun kenaikan harga minyak mentah menyebabkan biaya energi, transportasi, dan logistik meningkat signifikan. Produsen CPO di Indonesia menghadapi kenaikan biaya operasional di tengah harga jual yang fluktuatif. Selain itu, ketidakpastian pengiriman global, terutama ke pasar utama seperti India dan Tiongkok, juga memicu perlambatan perdagangan.

Pemerintah Indonesia merespons situasi ini dengan mendorong hilirisasi industri sawit dan peremajaan perkebunan rakyat. Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas dari 3 ton menjadi 7 ton per hektare. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi di tengah tingginya permintaan domestik dan global. Dengan demikian, meskipun perang Israel-Iran menciptakan tekanan baru di pasar global, Indonesia masih memiliki kemampuan untuk bertahan dengan menata ulang industri kelapa sawit agar lebih tangguh, bernilai, sehingga tidak terlalu terganggu dengan konflik negara lain. (JH)

Sebelum Telat, Yuk Dorong Biochar Limbah Sawit

Indonesia sebagai negara dengan populasi pohon sawit terluas di dunia mestinya memiliki kesempatan untuk mengubah limbah sawit yang ada menjadi *biochar*, bahan kaya karbon yang bermanfaat bagi lingkungan termasuk menyerap karbon dioksida dari udara. Limbah sawit seperti cangkang, tandan kosong, serta serat sawit merupakan limbah yang seringkali membebani. Jika tidak ditangani secara benar, limbah dimaksud bisa menjadi beban serius bagi lingkungan. Kini dengan teknologi yang telah tersedia, limbah-limbah tersebut bisa dijadikan *biochar* yang dapat mendukung *sustainability*.

Dari beberapa literatur, selama tahun lalu (2024), misalnya, Indonesia memproses 256 juta ton tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan 48,17 juta ton minyak sawit mentah (CPO). Secara bersamaan proses ini menghasilkan limbah biomassa dalam jumlah yang sangat besar, antara lain dalam bentuk tandan kosong (53,8 juta ton), cangkang sawit (16,4 juta ton), fiber (36,8 juta ton), minyak POME (1 juta ton), batang sawit (hingga 32,7 juta ton saat replanting), serta yang paling banyak pelepah sawit (300 juta ton). Dengan demikian, potensi biomassa sawit mencapai lebih dari 400 juta ton per tahun.

Pada dasarnya, *biochar* adalah bahan padat kaya karbon yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Proses ini disebut pirolisis, yakni pemanasan tanpa atau dengan oksigen yang terbatas. Untuk mendapatkan *biochar* berkualitas, *biochar* dapat dibuat menggunakan *carbonizer* bersertifikasi dalam suhu 500–650°C. *Biochar* terbuat dari berbagai limbah organik, terutama limbah pertanian. Karena itu, potensi bahan baku *biochar* sangatlah besar, seperti tempurung kelapa, sekam padi, kulit buah kakao, tongkol jagung, dan bahan organik lainnya. Setelah dipanaskan, *biochar* terlihat seperti arang, namun memiliki struktur yang jauh lebih berpori daripada arang biasa.

Menurut artikel Wastex (11/10/24), rongga-rongga pada *biochar* ini membuatnya memiliki kemampuan menyerap air yang sangat baik. Karena itu, *biochar* mampu menahan kelembapan dan mencegah erosi. *Biochar* dapat pula mengikat unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium,

sehingga mencegah unsur hara tersebut tersapu oleh air hujan.

Penting untuk diingat bahwa *biochar* bukan pupuk. Jika pupuk berfungsi sebagai sumber nutrisi langsung bagi tanaman, *biochar* lebih berperan sebagai pembenah tanah. *Biochar* memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas penyimpanan air, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Dengan kata lain, *biochar* bekerja secara tidak langsung untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman.

Menurut Deputi Direktur Transformasi Pasar RSPO Indonesia, Dr. M. Windrawan Inantha, pada 5th International Oil Palm Biomass Conference 2025 yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Indonesia memiliki peluang mengubah limbah biomassa dari 16 juta hektare kebun sawit menjadi sumber energi bersih serta menciptakan ekonomi baru (Info Sawit, 25/4). Dikatakan, dengan teknologi yang saat ini berkembang, *biochar* dapat meningkatkan energi sekaligus menyimpan karbon, berpotensi menyumbang PDB sebesar USD 1 miliar pada tahun 2030. Untuk merealisasikan hal tersebut, diusulkan agar segera diadakan inventarisasi biomassa nasional, investasi pengolahan tandan kosong dan cangkang, serta mewajibkan pabrik sawit menggunakan 50% limbahnya untuk energi mulai 2028.

Biochar adalah material unik yang dapat mengubah limbah pertanian menjadi sumber daya yang bernilai. Ia adalah solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan, pertanian, sekaligus peternakan saat ini. Dengan potensi yang sangat besar, *biochar* dapat menjadi kunci untuk mencapai pertanian dan peternakan berkelanjutan, meningkatkan kualitas tanah, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, *biochar* juga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Manfaat *biochar* dari sawit telah diteliti oleh banyak kalangan, di mana jurnal-jurnalnya mudah ditemui, sehingga yang dibutuhkan saat ini hanyalah sebuah niat kuat untuk menjadikannya aset ekonomi nasional Indonesia. (MAS)

Membaca Denyut Industri Sawit: Saatnya Punya Indeks yang Lebih Mencerminkan Dinamikanya

Industri kelapa sawit adalah salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari trademap, nilai ekspor produk sawit Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari USD 27 miliar, atau sekitar 10-12% dari total ekspor di sektor non-migas. Industri ini juga menyerap lebih dari 18 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berperan penting dalam program B40 untuk swasembada energi nasional.

Namun, ironisnya, sektor sebesar ini belum memiliki panggung yang layak di pasar modal. Emiten-emiten sawit masih diklasifikasikan dalam kelompok besar *Consumer Non-Cyclicals*, berdampingan dengan emiten rokok dan produsen makanan.

Ketiadaan indeks sektoral khusus membuat denyut industri sawit sulit dipantau secara kolektif. Padahal, sektor ini sangat rentan terhadap dinamika global—mulai dari fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO), isu keberlanjutan (ESG), hingga gejolak harga pupuk akibat perang dan krisis energi. Tanpa alat ukur bersama, sulit bagi investor, analis, maupun regulator untuk menangkap arah dan risiko sektor sawit secara utuh.

IDXENERGY adalah contoh bagaimana indeks sektoral mencerminkan dinamika industri. Saat harga batu bara melonjak tajam pada 2022, indeks ini mencatatkan kenaikan sebesar 66,7% dari Juli 2021 hingga Agustus 2022. Periode ini mencakup dampak dari lonjakan harga batu bara global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi. Mengingat pentingnya sektor sawit bagi perekonomian, akan sangat baik jika sawit memiliki indeks sektoral tersendiri untuk mencerminkan dinamika dengan lebih tepat.

Industri sawit memiliki emiten-emiten besar seperti AALI, LSIP, SIMP, TBLA, hingga DSNG yang memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Pada periode Januari-Desember 2022, rata-rata emiten sawit mencatat

pertumbuhan laba bersih hingga 100–300%, seiring lonjakan harga CPO yang mencapai RM 5.000/ton di pasar Malaysia. Performa yang signifikan ini menunjukkan betapa pentingnya sektor sawit dengan market cap yang besar, yang seharusnya dapat dipantau secara lebih efektif melalui indeks sektoral yang mencakup kinerja kolektif industri ini.

Dalam menyusun indeks sektoral untuk sektor sawit, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif pada indeks sektoral lainnya, dengan fokus pada elemen-elemen yang dapat mencerminkan kinerja industri secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang relevan adalah mengutamakan pergerakan harga saham serta kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan besar dalam sektor ini.

Hal ini memungkinkan indeks untuk memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai arah pasar dan kinerja sektor, mengingat bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika industri secara keseluruhan.

Sektor sawit memiliki dinamika yang berbeda antara sub-sektor hulu dan hilir. Fluktuasi harga CPO memberikan dampak yang berbeda: sektor hulu lebih terpengaruh secara langsung karena harga CPO merupakan komoditas utama, sementara sektor hilir terpengaruh melalui biaya bahan baku yang lebih tinggi.

Tentunya, penyusunan indeks sektor sawit dapat mempertimbangkan pembobotan sub-sektor, baik hulu hingga hilir, sehingga dapat lebih mencerminkan kondisi riil sektor ini. Dengan demikian, indeks dapat lebih akurat menggambarkan dinamika sektor sawit.

Sudah saatnya sawit tidak hanya dikenal sebagai “emas hijau”, tetapi juga memiliki kompas sektoral di lantai bursa. Jayalah sawit Indonesia. (FGK)

Menjawab Tantangan Sawit Rakyat Lewat Teknologi Spasial

Bayangkan hamparan perkebunan sawit dapat diakses layaknya Google Maps, di mana informasi penting seperti umur, kerapatan, kesehatan, dan potensi produksi tanaman bisa tersedia dalam sekali klik. Inilah teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*), yang menyediakan data dari hasil interpretasi citra satelit. Meski bukan hal baru, teknologi ini tetap relevan karena kemampuannya menyediakan data lanskap kebun yang luas dengan resolusi yang semakin baik dan harga kompetitif, sehingga lebih efisien dalam operasional. *Ground check* sesekali tetap dibutuhkan, dan drone bisa digunakan untuk akurasi lapangan yang lebih spesifik.

Namun data mentah dari satelit tidak dapat langsung dimanfaatkan. Di sinilah peran analisa *Geographic Information Systems* (GIS) dilakukan. GIS memungkinkan data spasial dari *remote sensing* diolah menjadi informasi tematik yang dibutuhkan di perkebunan kelapa sawit. Data citra dan tematik tersebut dapat di-*overlay* dengan berbagai informasi, seperti batas blok, batas administrasi, hingga kontur lahan, ke dalam satu platform analisis yang terpadu dengan bantuan teknik mutakhir seperti *machine learning*.

Penelitian Descals et al. (2024) menunjukkan radar Sentinel-1 dan algoritma deep learning dapat memetakan umur tanaman sawit dengan akurasi mencapai 71% (perkebunan rakyat) hingga 91% (perkebunan besar). Umur tanaman ini dimodelkan berdasarkan ketinggian tanaman dengan pendekatan *Digital Surface Model* (DSM) dan *Digital Terrain Model* (DTM).

Pengolahan data Citra satelit juga dapat menghasilkan NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), yaitu indeks kehijauan daun yang berkorelasi dengan kadar hara daun. Studi di Sumatera menunjukkan bahwa NDVI memiliki hubungan erat dengan kandungan hara nitrogen (N) dalam daun. Informasi ini cukup kuat sebagai deteksi awal untuk kondisi hara tanaman dan kebutuhan pupuk.

NDVI tidak menggantikan uji laboratorium daun atau rachis yang diperoleh dari leaf sampling unit (LSU) dan analisa tanah dari *Soil Sampling Unit* (SSU), tapi bisa menjadi indikator awal untuk mendeteksi blok bermasalah secara umum. Sebagai contoh, penelitian di perkebunan sawit di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa NDVI baru mampu mendeteksi unsur nitrogen secara konsisten, menandakan pentingnya penyesuaian model sesuai kondisi lokal untuk pemanfaatan optimal.



Nilai strategis lainnya dari GIS berbasis data *remote sensing* adalah mendukung pemerintah menyelesaikan masalah di perkebunan sawit rakyat, yang mencakup sekitar 42% dari luas perkebunan sawit nasional. Pemerintah menghadapi tantangan nyata berupa kebun rakyat yang tersebar, akses yang terbatas, dan kualitas budidaya yang bervariasi. Dengan analisa GIS pada citra yang diperbarui secara berkala, maka pemetaan dapat dilakukan secara reguler untuk memantau kemajuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sekaligus memverifikasi realisasi dan perencanaannya.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2025, kebun yang dapat diremajakan dalam program PSR apabila berusia di atas 25 tahun, produktivitas di bawah 10 ton/ha/tahun dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul. GIS memungkinkan pendugaan dan identifikasi kebun yang memenuhi kriteria tersebut, serta pemetaan area yang layak untuk *replanting*. GIS juga berguna untuk memantau penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) secara spasial dengan mengintegrasikan data pendukung lainnya.

Walaupun masih adanya tantangan terkait ketersediaan citra resolusi tinggi dan keterbatasan tenaga ahli namun metode ini masih dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan dapat menjadi bagian penting dari perumusan kebijakan untuk perkebunan sawit rakyat. Pemanfaatan GIS berbasis *remote sensing* yang lebih *advance* akan dibutuhkan terutama sebagai sistem informasi strategis untuk mendukung industri sawit nasional yang berkelanjutan. (DS)

Menyeimbangkan Harga, Menumbuhkan Pasar: Skema Insentif untuk Tata Kelola UCO

Minyak jelantah (*Used Cooking Oil/UCO*) bukan lagi sekadar limbah. Di berbagai negara, UCO umum digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Kini, pemanfaatannya meluas ke sektor strategis sebagai bahan baku utama untuk *Sustainable Aviation Fuel* (SAF), bahan bakar rendah karbon yang dapat menurunkan emisi penerbangan hingga 80%.

Indonesia memiliki potensi UCO lebih dari 3 juta kiloliter per tahun. Namun pada 2024, baru sekitar 640 ribu kiloliter berhasil dikumpulkan. Sebagian besar (sekitar 50%) diekspor karena hilirisasi dalam negeri masih terbatas. Permintaan domestik masih rendah karena biodiesel nasional masih mengandalkan CPO, sementara kilang SAF masih dalam tahap pembangunan.

Pertamina saat ini tengah menyiapkan kilang SAF berbasis UCO. Namun harga beli yang ditawarkan hanya sekitar Rp6.000/liter, jauh di bawah harga ekspor sebesar Rp10.800–11.500/liter. Sementara itu, Permendag No. 2/2025 mulai membatasi ekspor UCO, menciptakan tekanan baru di tengah kesiapan pasar domestik yang belum optimal.

Lantas, mungkinkah harga UCO domestik mendekati harga ekspor? Jawabannya: bisa, melalui skema insentif yang terkoordinasi dan progresif. Tentu, perubahan ini tidak dapat terjadi secara instan. Namun, melalui desain kebijakan yang tepat, proses ini bisa dibangun secara bertahap dalam tiga fase yang saling memperkuat.

Kuncinya terletak pada efektivitas *pass-through*, yakni kemampuan insentif yang diberikan di hilir (misalnya kepada produsen SAF) untuk mengalir ke seluruh rantai pasok hingga ke tingkat pengumpul dan rumah tangga. Jika skema ini berjalan dengan baik, maka setiap insentif akan meningkatkan daya saing SAF sekaligus mendorong kenaikan harga beli UCO di tingkat hulu secara bertahap.

Fase 1: Meningkatkan permintaan SAF domestik.

Permintaan yang kuat akan SAF akan mendorong harga UCO naik secara alami. Salah satu kebijakan potensial adalah mandat bauran SAF dalam avtur nasional. Pemerintah juga bisa mendorong *tax holiday* (pembebasan pajak bagi investor SAF) dan *green surcharge* (biaya tambahan untuk

mendukung energi hijau). Ketika permintaan SAF meningkat, nilai pasar UCO domestik pun terangkat.

Fase 2: Menyalurkan insentif fiskal dan pembiayaan hijau (fase insentif penuh).

Instrumen seperti *tax credit* (pengurangan pajak atas produksi hijau), *green bond* (obligasi proyek ramah lingkungan), *green loan* (pinjaman berbunga ringan), dan hibah berbasis hasil (*result-based financing*) dapat meningkatkan daya saing SAF. Untuk menjamin efektivitas, diperlukan sistem pencatatan digital dan *traceability* yang kuat.

Fase 3: Menetapkan harga dasar berbasis nilai lingkungan (fase optimal).

Standar mutu nasional UCO penting agar industri SAF bersedia membayar harga premium. Dengan sistem registri digital, asal-usul dan kualitas UCO dapat diverifikasi. Hal ini membuka jalan untuk penetapan harga dasar nasional yang memperhitungkan kontribusi terhadap pengurangan emisi.

Simulasi kebijakan menunjukkan bahwa jika ketiga skenario berjalan, harga UCO dalam negeri dapat. Jika insentif ini diteruskan ke hulu sebesar 20–80% nilainya, maka harga UCO domestik bisa naik Rp3.000–Rp8.000/liter, meningkat menjadi Rp9.000/liter (fase insentif penuh), dan melampaui Rp11.000/liter (fase optimal). Ini menunjukkan pasar domestik dapat bersaing dengan ekspor.

Lebih dari sekadar reformasi tata niaga, strategi ini membawa UCO masuk ke dalam kerangka ekonomi sirkular. UCO yang dulunya terbuang, kini bisa menjadi bahan baku energi bersih. Hal ini menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi polusi, serta membuka peluang kerja hijau di sektor informal hingga industri energi.

Kuncinya bukan pada satu kebijakan tunggal, melainkan pada aktivasi simultan dari serangkaian insentif yang saling menguatkan. Ketika harga terbentuk dari dinamika pasar yang mendukung keberlanjutan, maka UCO tidak lagi menjadi sisa, tetapi masa depan energi Indonesia. (DS)

Membaca Ulang Pasar Sawit: Analisa Peluang Diversifikasi Pasar Sawit

Dalam satu dekade terakhir, peta perdagangan minyak nabati dunia mengalami dinamika yang luar biasa. Perang harga, kebijakan tarif, persaingan pasar, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan konsumen terhadap isu keberlanjutan telah mendorong negara-negara pengimpor untuk menyesuaikan strategi mereka yang lebih adaptif. Di tengah kompleksitas ini, minyak sawit Indonesia tetap bertahan sebagai salah satu komoditas paling strategis.

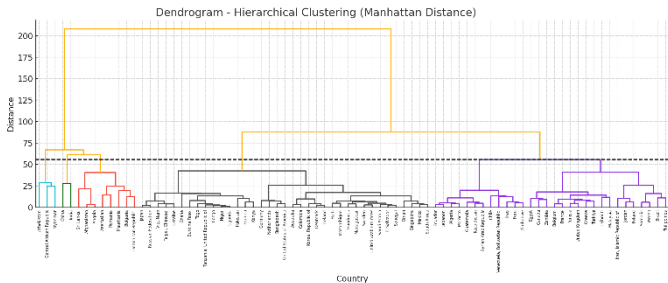
Meski ekspor minyak sawit mentah (CPO) menurun dari 7,8 juta ton pada 2015 menjadi hanya 3 juta ton pada 2024, ekspor fraksinasi CPO justru menunjukkan tren peningkatan (BPS, 2025). Ini mencerminkan pergeseran struktur supply-demand sawit Indonesia—dari ekspor bahan baku mentah menuju bahan baku yang lebih siap masuk ke rantai pasok produk turunan. Namun, tantangan ke depan tidak lagi sekadar menyangkut produksi atau diferensiasi produk, melainkan menysasar persoalan paling mendasar: **pasar itu sendiri**.

Berdasarkan analisis terhadap tren impor minyak nabati dunia dalam 10 tahun terakhir dari 80 negara, kami menemukan pola dan pengelompokan perilaku impor negara-negara tersebut. Dengan menggunakan metode *hierarchical clustering*, dengan pendekatan jarak Manhattan, dilakukan analisa dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel seperti pertumbuhan impor sawit (CAGR), proporsi sawit terhadap total impor minyak nabati, volatilitas preferensi, dan frekuensi *switching* antar jenis minyak.

Hasil pengelompokan negara-negara pengimpor minyak nabati menghasilkan lima klaster yang mencerminkan variasi karakteristik pasar minyak sawit, dari potensi ekspansi hingga kestabilan dan elastisitas konsumsi.

Klaster 1, yang terdiri dari **3 negara** dengan karakteristik volume impor kecil namun pertumbuhan konsumsi sawit yang tinggi, mencerminkan **pasar kecil dan emerging**. *Switching* impor sedang, tapi cenderung stabil. Untuk negara yang termasuk klaster ini, strategi ekspansi jangka menengah dengan pendekatan efisiensi harga, dan kemitraan logistik (hub) sangat relevan.

Klaster 2 hanya berisi **dua negara strategis**, yakni **India dan China**. Kedua negara ini merupakan **pasar jagkar sawit global** dengan volume impor sangat besar, proporsi konsumsi sawit tinggi (>70%), *switching* dan volatilitas pasar sangat rendah. Klaster ini mencerminkan kestabilan



Sumber gambar: Cluster Analysis Vegetable Oil Market (diolah, 2025)

dan loyalitas struktural terhadap pasokan sawit Indonesia. Strategi keberlanjutan dan diplomasi dagang jangka panjang sangat penting untuk mempertahankan posisi ini.

Sementara itu, **Klaster 3**, yang terdiri dari 8 negara, merepresentasikan **pasar oportunistik** dengan *switching* tinggi dan pertumbuhan konsumsi sawit yang cepat. Proporsi sawit mereka masih sedang, namun sensitivitas terhadap dinamika harga dan pasokan sangat tinggi. Untuk kelompok ini, strategi yang bersifat **taktis dan responsif**, seperti fleksibilitas pasok dan promosi substitusi saat terjadi gangguan minyak nabati lain, menjadi pendekatan yang paling relevan.

Klaster 4 adalah kelompok terbesar dengan **37 negara**. Mereka menampilkan **stabilitas dalam konsumsi sawit**, ditandai oleh *switching* yang sangat rendah, proporsi impor sawit tinggi, dan volatilitas sangat rendah. Strategi ideal adalah menjaga kontinuitas ekspor melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama jangka panjang, terutama dalam konteks penguatan industri hilir.

Klaster	Karakteristik Klaster
1	Pasar kecil dan <i>emerging</i> . <i>Switching</i> impor sedang, tapi cenderung stabil.
2	Pasar utama, volume besar, <i>switching</i> sangat rendah
3	Pasar oportunistik dengan <i>switching</i> tinggi, proporsi impor sawit sedang, sensitivitas terhadap harga
4	Pasar stabil, <i>switching</i> rendah, proporsi impor sawit tinggi, dan volatilitas sangat rendah
5	Pasar sensitif terhadap dinamika pasar. <i>Switching</i> dan proporsi impor sawit sedang.

Sumber : Cluster Analysis Vegetable Oil Market (diolah, 2025)

Adapun **Klaster 5**, terdiri dari **30 negara**, menampilkan **pola konsumsi sawit yang cukup kuat namun tetap sensitif terhadap dinamika pasar**. *Switching* masih terjadi namun terbatas, dan proporsi impor sawit sedang. Pasar negara dalam klaster ini bisa dikelola dengan strategi kombinasi antara efisiensi harga dan jaminan keberlanjutan pasok.

Demikianlah pemanfaatan analisa klaster ini dalam mempertimbangkan strategi ekspor minyak sawit, di mana diversifikasi pasar sawit dapat melihat dari sisi karakter pasar, baik dari sisi stabilitas, elastisitas, maupun potensi tumbuhnya. Dengan memahami “DNA impor” masing-masing negara, ekspor sawit Indonesia bisa lebih adaptif, resilien, dan terarah dalam menghadapi pasar global yang terus berubah. (DHP)

Minyak Sawit dan Arah Baru Diplomasi Tarif AS di Era Kesehatan Global

Selama dua dekade terakhir, Amerika Serikat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam impor minyak sawit (CPO dan turunannya). Berdasarkan data *International Trade Center* (ITC), volume impor minyak sawit ke AS meningkat dari sekitar 286 ribu ton pada 2005 menjadi 1,75 juta ton pada 2024, dengan dominasi pasokan dari Indonesia sebesar 91,4 persen. Peningkatan tersebut mencerminkan pertumbuhan tahunan (CAGR) yang tinggi, yakni sekitar 10 persen. Pada tahun 2024, pangsa impor minyak sawit mencapai 53,4 persen dari total impor minyak nabati AS, jauh di atas minyak kelapa (15,1 persen), minyak inti sawit (11 persen), minyak kedelai (8,5 persen), dan minyak bunga matahari (6,6 persen).

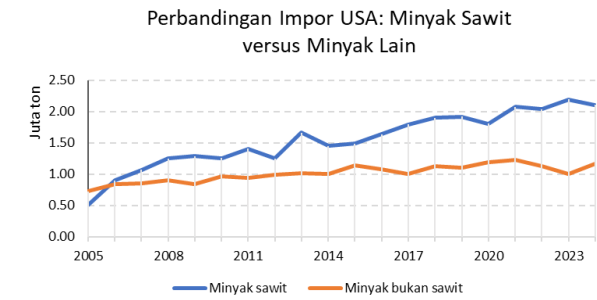
Jenis Minyak Nabati	Kuantitas Impor (ton)	
	2005	2024
Minyak Sawit	286,161	1,748,913
Minyak kelapa	383,327	494,836
Minyak inti Sawit	221,236	360,401
Minyak kedelai	88,873	278,617
Minyak bunga matahari	72,555	217,253
Other	94,051	175,658

Sumber data: Biro Statistik Amerika Serikat Tahun 2024 (diolah, 2025)

Fenomena peningkatan impor ini menarik karena terjadi di tengah berbagai tekanan perdagangan, ditambah adanya isu keberlanjutan dan tuduhan deforestasi dalam 1 dekade terakhir. Pertanyaannya, apakah tren permintaan ini tetap berlanjut, mengingat adanya kebijakan tarif dagang baru yang akan diterapkan AS pada Agustus 2025 mendatang.

Bagi produk asal Indonesia, akan dikenakan tarif sebesar 19 persen sedangkan untuk Malaysia, tarifnya 25 persen. Secara teori, kebijakan ini berpotensi menaikkan biaya perolehan bagi industri pangan dan konsumen di AS, sekaligus mengubah peta persaingan pasokan minyak nabati global.

Namun, laju permintaan yang tinggi pada periode sebelumnya, menunjukkan minyak sawit dapat memenuhi kebutuhan struktural bagi industri makanan AS. Sebab,



Sumber gambar: Biro Statistik Amerika Serikat Tahun 2024 (diolah, 2025)

minyak sawit memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Minyak sawit yang dihasilkan dari daging buah (*mesocarp*) memiliki kandungan asam lemak semi-padat secara alami, tanpa perlu proses hidrogenasi parsial. Karena itu, minyak sawit tidak mengandung *Trans-fatty Acid* (TFA), jenis lemak trans yang telah dilarang di AS sejak 2018 karena terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung.

Trans-fatty Acid merupakan senyawa lemak hasil proses hidrogenasi parsial di industri *refinery*, yang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan kematian dini. Dalam pertemuan tingkat tinggi keempat Majelis Umum PBB pada September 2025 nanti, PBB berencana untuk menghapus TFA industri secara global, dengan target eliminasi penuh.

Di AS, FDA melarang penggunaan *Partially Hydrogenated Oils* (PHOs)—sumber utama TFA—sejak pertengahan 2018. Larangan ini menciptakan kekosongan dalam rantai pasok industri makanan, mengingat PHOs sebelumnya digunakan secara luas dalam margarin, biskuit, makanan beku, dan makanan cepat saji. Sebagai minyak nabati yang stabil secara fungsional dan aman secara kesehatan, minyak sawit mampu menggantikan PHOs tanpa menimbulkan TFA.

Keunggulan ini telah menjadikan sawit sebagai pilihan utama dalam reformulasi produk pangan, dan telah mendorong pertumbuhan konsumsinya di industri makanan AS selama 2 dekade terakhir. Oleh karena itu, walaupun adanya tarif impor yang tinggi, permintaan minyak sawit tidak akan terganggu, karena menawarkan keunggulan dari sisi kesehatan, ketersediaan pasokan dalam volume besar, dan harga yang relatif kompetitif dibanding minyak nabati lainnya.

Kondisi ini membuka peluang strategis bagi Indonesia sebagai produsen utama sawit dunia. Posisi tawar perdagangan Indonesia dapat diperkuat dengan menyampaikan narasi berbasis sains bahwa minyak sawit adalah solusi teknis dan kesehatan publik yang tidak dapat ditawarkan minyak nabati lain. Selain bebas TFA, minyak sawit dapat diproduksi dan diekspor dalam skala besar secara berkelanjutan, asalkan mampu memenuhi tuntutan pasar global terhadap sertifikasi dan transparansi rantai pasok. (DHP)

Efektivitas Skema PSR: Dari Usulan Pekebun ke Inisiatif Pemerintah

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Dari total 16,38 juta hektare lahan sawit di Indonesia pada 2019, sekitar 42% dimiliki oleh petani rakyat. Ironisnya, 2,8 juta hektare di antaranya masuk kategori tidak produktif karena usia tanaman yang tua, rusak, atau bahkan terlantar.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menetapkan target peremajaan kebun sawit rakyat seluas 180.000 hektare per tahun. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan produktivitas kebun, serta mendukung peningkatan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku mandatori biodiesel nasional.

Namun, realisasi lapangan menunjukkan capaian yang belum sesuai harapan. Dalam kurun waktu tahun 2019–2023, capaian tahunan rerata berkisar 50.000 hektare. Fakta ini menunjukkan bahwa ada tantangan dan hambatan yang terjadi yang tidak terlepas dari skema pelaksanaan program yang masih mengandalkan pendekatan *bottom-up*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 5 Tahun 2025, skema pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) saat ini secara tegas mengedepankan pendekatan *bottom-up*, yaitu pengusulan PSR berasal dari pekebun. Hal ini dapat dilihat bahwa bantuan dana PSR hanya dapat diberikan melalui pengusulan yang dilakukan melalui lembaga pekebun kepada Dinas Kabupaten/Kota atau melalui jalur kemitraan ke Ditjen Perkebunan.

Prosesnya memerlukan banyak dokumen, mulai dari legalitas lahan, peta koordinat kebun, hingga rencana anggaran dan kerja, dengan semua anggota kelembagaan harus terdaftar di sistem SIMLUHTAN. Skema *bottom-up* ini memiliki keunggulan dari sisi partisipatif dan pemberdayaan yang berangkat dari kebutuhan dasar (*basic needs*) petani yang sulit membiayai sendiri peremajaan sawitnya.

Akan tetapi, skema ini menghadapi tantangan besar di lapangan, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya sosialisasi, hambatan administrasi, sulitnya penyediaan data koordinat kebun dan kendala legalitas lahan. Hal ini tercermin dari realisasi PSR yang masih di bawah target.

Akibatnya, hambatan teknis seperti penyediaan data koordinat, dan non teknis seperti legalitas lahan membuat petani merasa sulit dan memilih untuk tidak mengikuti

program PSR untuk meremajakan tanamannya. Sehingga menyebabkan minimnya minat petani untuk mengikuti program PSR.

Jika, skema pengusulan *bottom-up* yang selama ini berjalan tidak mampu mengejar capaian target PSR, maka skema *top-down* dapat dijadikan alternatif.

Perbedaan Alur Skema Program PSR

Skema Bottom Up



Skema Top Down



Dalam skema ini, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui proses pemetaan lahan sawit rakyat secara menyeluruh dengan dukungan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*) yang kemudian dikonfirmasi ke lapangan. Secara spasial batas lahan sawit rakyat dapat didelineasi pada area yang tidak produktif dan sudah berusia tua.

Dari hasil analisis tersebut, pemerintah dapat merencanakan lahan yang berpotensi, untuk selanjutnya disurvei dan ditetapkan sebagai lahan rencana peremajaan. Tahapan selanjutnya dilakukan pemerintah dapat melakukan pendekatan langsung kepada petani pemilik lahan untuk mengonfirmasi kondisi dan kesiapan mereka mengikuti program.

Dengan demikian, petani tidak lagi terbebani oleh proses administrasi awal yang kompleks seperti penyediaan data koordinat, dan legalitas kebun. Prosesnya juga dapat lebih efisien, dan cepat, serta mutu peremajaan sawit dapat lebih terjamin.

Selain itu, Pemerintah dapat lebih mudah memastikan legalitas lahan, memverifikasi kebenaran data, dan mengarahkan program PSR agar selaras dengan prinsip keberlanjutan yang memenuhi standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Perubahan skema dari usulan pekebun ke inisiatif pemerintah dapat diharapkan menjadi jalan keluar dari lambatnya realisasi PSR. Dalam jangka panjang, skema ini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional dengan meningkatnya produktivitas sawit rakyat. (MA)

Kelembagaan Kuat, PSR Tangguh: Transparansi dan Partisipasi Jadi Kunci

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menjadi harapan besar pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sawit nasional dari sektor perkebunan rakyat. Namun, capaian program ini masih belum optimal akibat berbagai tantangan implementasi. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya peran kelembagaan petani, yang seharusnya mampu menjadi motor penggerak dalam percepatan realisasi program PSR.

Secara teoritis, kelembagaan petani berfungsi sebagai instrumen kolektif yang memperkuat akses petani terhadap sumber daya, informasi, dan pasar, sekaligus meningkatkan kapasitas adaptif dalam mengelola program. Kale et al. (2024) menekankan bahwa kelembagaan yang efektif—seperti koperasi atau kelompok tani formal—memiliki peran strategis dalam mempercepat alih teknologi dan menstabilkan pendapatan petani melalui fungsi koordinasi dan mitigasi risiko.

Selain itu, prinsip-prinsip kelembagaan yang dikembangkan Ostrom (1990) dan diperkuat oleh Grashuis (2025), seperti kejelasan keanggotaan dan mekanisme pengawasan internal, terbukti penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi tani. Sejalan dengan itu, Permentan No. 05 Tahun 2025 mengatur bahwa pekebun wajib tergabung dalam kelembagaan yang terdaftar di SIMLUHTAN, memiliki struktur hukum, serta memenuhi syarat jumlah anggota dan luas hamparan untuk dapat mengakses program PSR (Pasal 36, 42, dan 43).

Studi IPOSS dan Bina Swadaya Konsultan pada 2024 menunjukkan bahwa peran kelembagaan petani belum sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan analisis persamaan struktural terhadap 225 responden dari Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Riau, ditemukan bahwa kelembagaan bahkan berpengaruh negatif terhadap keberhasilan PSR. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga petani belum menjalankan peran strategisnya secara optimal. Contohnya terlihat di

beberapa koperasi di Sumatera Utara, di mana banyak petani mengalami kendala administratif akibat kelembagaan yang pasif dan tidak terorganisir.

Namun, terdapat praktik baik dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Koperasi Maju Jaya di Desa Pelambaian berhasil membuktikan bahwa kelembagaan petani yang kuat mampu menjadi penggerak utama keberhasilan PSR. Koperasi ini tidak hanya mengurus aspek administratif dan legalitas, tetapi juga aktif dalam pemetaan spasial, penyusunan RAB, dan aspek agronomis. Tata kelola internal yang baik, pengambilan keputusan kolektif, serta pembagian tugas berdasarkan kompetensi anggota menjadi kunci keberhasilan mereka. Realisasi program berjalan tepat waktu, dan hasilnya nyata: tanaman sawit telah menghasilkan buah dengan Berat Janjang Rerata (BJR) di atas 5kg pada panen perdananya.

Keberhasilan serupa sebenarnya juga dapat diraih koperasi yang bermitra dengan perusahaan, asalkan prinsip pemberdayaan tetap diutamakan. Artinya, pengelolaan program PSR tidak dikerjakan oleh perusahaan tanpa melibatkan petani. Perusahaan mitra yang menyediakan pelatihan dan pendampingan secara aktif seharusnya mampu meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota koperasi, yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan peremajaan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Ke depan, penguatan kelembagaan harus menjadi strategi kunci dalam akselerasi program PSR. Baik melalui jalur dinas maupun kemitraan, keberhasilan program sangat bergantung pada keberadaan tata kelola kelembagaan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan demikian, PSR tidak hanya menjadi program teknis penggantian tanaman tua, tetapi juga menjadi wahana transformasi sosial-ekonomi petani berbasis kelembagaan. (SN)



Kemitraan dalam PSR: Jalan Menuju Keberlanjutan Sawit



Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah digulirkan sejak satu dekade lalu sebagai upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat. Dalam perjalanannya, terjadi perkembangan signifikan sejak 2022, di mana pengusulan PSR tak lagi hanya melalui jalur dinas, tapi juga dapat dilakukan melalui jalur kemitraan. Melalui skema ini, petani bisa menggandeng perusahaan perkebunan sebagai mitra strategis dalam proses peremajaan—baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun pembiayaan.

Jalur ini membuka peluang lebih besar bagi petani, terutama yang telah bermitra sebagai petani plasma, untuk mengakses program PSR dengan dibantu Perusahaan mitranya. Perusahaan mitra memiliki peran penting dalam mendampingi petani—mulai dari pembentukan kelembagaan, pengumpulan administrasi, pemetaan lahan, penyusunan RAB, hingga pelengkapan dokumen. Sebelumnya, proses ini menjadi kendala karena keterbatasan pengetahuan dan biaya bagi petani. Diharapkan, kolaborasi ini dapat mempercepat realisasi dan menjangkau area kebun rakyat yang lebih luas.

Sayangnya, realisasi PSR jalur kemitraan masih jauh dari harapan. Target pemerintah sebesar 80 ribu hektare pada 2022–2023 hanya tercapai sekitar 10 ribu hektare. Ini mencerminkan kesenjangan antara harapan regulasi dan kenyataan di lapangan, baik dari sisi pemahaman petani maupun kesiapan perusahaan. Padahal, kebijakan jalur kemitraan telah diatur dalam berbagai regulasi di bidang pertanian (Peraturan Pemerintah No. 26/2021) maupun bidang pertanahan (Peraturan Pemerintah No. 18/2021) beserta regulasi turunannya. Tentunya kebijakan tersebut

dirancang sebagai skema kolaboratif untuk mendorong perbaikan kebun sawit rakyat secara lebih terstruktur, dengan perusahaan sebagai *leading sector*.

Dari sisi perusahaan, kemitraan merupakan kebutuhan dalam mendukung keberlanjutan usaha, melalui peningkatan produktivitas kebun petani mitranya. Melalui identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang sudah ditetapkan Kepala Daerah, perusahaan dapat membantu mengevaluasi kebun yang sudah tua atau tidak produktif untuk dimasukkan dalam pengusulan program PSR, sehingga peremajaan dilakukan tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemitraan merupakan komitmen jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan petani, keberlanjutan usaha serta merupakan hubungan yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan petani.

Bagi petani, jalur kemitraan terbukti memberikan banyak keuntungan. Selain pendampingan teknis dan kemudahan administrasi, perusahaan mitra juga memberi kepastian arah usaha setelah peremajaan. Studi oleh Nugroho et al. (2023) menunjukkan bahwa petani yang bermitra mampu menyelesaikan pengusulan PSR dalam waktu kurang dari enam bulan, dengan hasil kebun yang meningkat hampir dua kali lipat dalam tiga tahun. Sementara Sari dan Hidayat (2024) menemukan bahwa kemitraan juga mampu menjembatani kesenjangan teknologi dan informasi yang selama ini menjadi hambatan petani mandiri. Namun, keterbatasan pemahaman, kekhawatiran akan dominasi perusahaan, serta minimnya pendampingan kelembagaan membuat sebagian petani masih ragu untuk terlibat.

Kemitraan dalam program PSR bukan sekadar jalan pintas untuk mempercepat realisasi peremajaan kebun sawit rakyat, tetapi merupakan strategi kolaboratif jangka panjang yang mendatangkan manfaat luas. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan kelembagaan petani untuk memperkuat pemahaman, membangun kepercayaan, dan menciptakan ekosistem kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Di tengah tantangan pendanaan dan keterbatasan kapasitas petani, jalur kemitraan hadir sebagai solusi konkret yang sudah seharusnya dioptimalkan. Dengan kemitraan yang kuat, PSR bukan lagi sekadar program, melainkan gerakan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit secara nasional di Indonesia. (RFY)

IPOSS  **NEWS**
INDONESIA PALM OIL STRATEGIC STUDIES

Pembina: **Sofyan Djalil**, Pimpinan Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP**
Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridli, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer**
Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id